



PEMERINTAH KOTA BIMA
BAPPEDALITBANG

Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Telp/Fax.(0374) 44088 Raba-Bima

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN

TAHUN ANGGARAN
2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Bima Tahun 2018 telah dapat terselesaikan. LKIP BAPPEDA LITBANG sebagai hasil akhir proses penyusunan laporan kinerja yang memuat akuntabilitas kinerja dan keuangan serta hasil akhir kegiatan dan capaian program yang dapat dicapai oleh satu atau lebih kegiatan yang bermuara pada sasaran program yang telah direncanakan.

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP ini dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2013-2018 sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2018 berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RENSTRA BAPPEDA LITBANG Kota Bima tahun 2013-2018. Hasil penilaian capaian kinerja pada tahun 2018 yang telah dievaluasi akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja BAPPEDA LITBANG Kota Bima tahun 2018.

Penyusunan laporan kinerjanya telah diupayakan sebaik mungkin. Walaupun demikian, disadari bahwa laporan yang telah disusun tidak terlepas dari kekurangan sehingga masih terus memerlukan penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya, semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi evaluasi kinerja BAPPEDA LITBANG khususnya dan kegiatan Pembangunan di Kota Bima pada umumnya.

Raba-Bima, Januari 2019
Kepala BAPPEDA LITBANG,

Ir. DARWIS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196012311991031087

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Susunan, serta Tugas dan Fungsi Organisasi	2
1.3. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	21
2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	23
2.3. Rencana Kinerja Tahunan	24
2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2018	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2. Realisasi Anggaran	63
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah.....	67
4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah	68
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA LITBANG Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban BAPPEDA LITBANG Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2018 ini, mengacu kepada Rencana Strategis BAPPEDA LITBANG Kota Bima 2013 - 2018 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013 - 2018, Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2018 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja BAPPEDA LITBANG ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja BAPPEDA LITBANG selama tahun 2018.

1.2. Kedudukan, Susunan, serta Tugas dan Fungsi Organisasi

1.2.1. Kedudukan Organisasi

Bappeda Litbang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

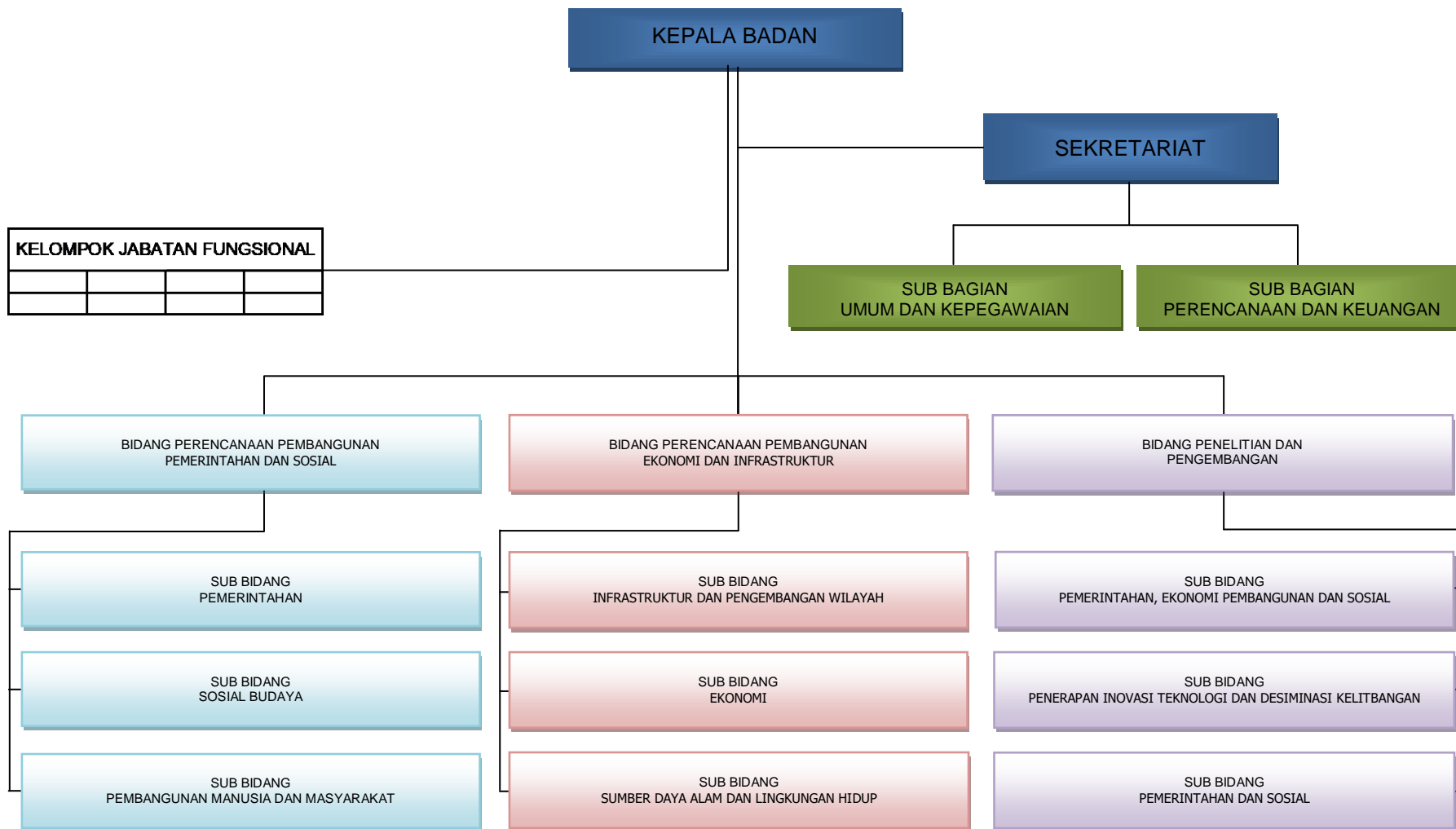
1.2.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - c. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Sub Bidang Ekonomi; dan
 - c. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Sosial;
 - b. Sub Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan;
dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bima



1.2.3. Tugas dan Fungsi Organisasi

A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi, pengkajian, penelitian, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi;
- 2) Penetapan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan;
- 3) Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan dan percepatan pembangunan Daerah;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 6) Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah secara makro;
- 7) Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPJ);
- 8) Pelaksanaan program kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peningkatan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, Kerjasama Pembangunan, Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Penyiapan potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah serta pengembangan peraturan Perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan petunjuk teknis pembangunan daerah, pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan serta

wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah serta keserasian pembangunan daerah sesuai manajemen pengembangan wilayah dan kawasan daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah;

- 10) Pengoordinasian kegiatan Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- 2) Pengelolaan urusan keuangan;
- 3) Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- 4) Pengelolaan urusan ASN; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- g. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan

- anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. *Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial*

Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
- 2) Verifikasi Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang pemerintahan dan sosial;
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan sosial;
- 7) Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- 8) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- 9) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- 10) Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- 11) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial membawahi:

- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
- c. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- b. Analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Urusan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- c. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- d. Perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, DPRD dan Kecamatan;
- e. Perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- f. Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- g. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;

- h. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Pelaksanaan analisa Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Perencanaan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;

- h. pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Pembangunan Manusia dan Masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- b. pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- c. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- d. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- e. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;

- f. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- g. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- h. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. *Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur*

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Infrastruktur, Ekonomi dan SDA serta penilaian atas pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, PJMD, dan RKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- 2) Pelaksanaan verifikasi Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- 3) Pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- 4) Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan

- Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- 5) Pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - 6) Pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - 7) Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - 8) Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - 9) Pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - 10) Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - 11) Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi; dan
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur membawahi:

- a. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Sub Bidang Ekonomi; dan
- c. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.

Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Pelaksanaan pengkajian dan telaah usulan RKA-SKPD bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan antara Rencana Kegiatan SKPD dengan Renstra SKPD, skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, visi dan misi Walikota serta RPJMD Kota;
- e. Penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. Penyiapan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka penyusunan LAKIP;
- h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- b. Analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- c. Perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJP, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- d. Perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- e. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- f. Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- g. Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- h. Perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- i. Penyiapan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dalam rangka penyusunan LAKIP;
- j. Pendelegasian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai

dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi;

- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang ekonomi; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang SDA dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah berdasarkan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan;
- b. Penyusunan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. Perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. Penyiapan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup dalam rangka penyusunan LAKIP;
- h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sub Bidang SDA dan lingkungan Hidup;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

E. *Bidang Penelitian dan Pengembangan*

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan, merumuskan kebijakan, mensosialisasikan, mengevaluasi, monitoring dan menyampaikan laporan di bidang pemerintahan umum dan Pengkajian Peraturan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Penerapan dan inovasi teknologi serta Diseminasi kelitbangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
- 2) Penyusunan dokumen pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi, serta Desiminasi Kelitbangan;
- 3) Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Pemerintahan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
- 4) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, di bidang sosial dan kependudukan, di bidang ekonomi dan pembangunan, di bidang penerapan dan Inovasi Teknologi; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:

- a. Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;
- b. Sub Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, dan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Membantu kepala Bidang dalam perumusan rencana program kerja tahunan sub bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi pembangunan, dan sosial;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum, perlindungan masyarakat, perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, Penanaman modal, koperasi, UKM, badan usaha milik daerah, sumber daya alam, pengembangan wilayah fisik dan prasarana, dan sosial, pemberdayaan perempuan, pendidikan kebudayaan serta pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi. pembangunan dan sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penerapan, Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana program kerja tahunan pada Sub Bidang Penerapan, Inovasi Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang Penerapan teknologi dan inovasi serta desiminasi kelitbangan meliputi

aspek-aspek antara lain; uji coba, penerapan rancang bangun/model, replikasi, penerapan teknologi, dan perekayasa di bidang teknologi serta memfasilitasi hak kekayaan intelektual;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana program kerja tahunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. Menyiapkan bahan evaluasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum, kependudukan serta informasi dasar kewilayahan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan capaian kinerja pelaksanaan pemerintah daerah;
- e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan forum litbang, forum perencanaan dan forum evaluasi program dan kegiatan pemerintah daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional

diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

1.3. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

BAPPEDA LITBANG sebagai OPD yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pembinaan perencanaan pembangunan daerah dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pengintegrasian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Masih belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan OPD.
3. Masih terdapat OPD yang menyusun dokumen perencanaannya tidak memenuhi ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan.
4. Terbatasnya ketersediaan sumber daya yang menyediakan dan mengelola sistem informasi data base kelitbangan.
5. Kemampuan dan kapasitas individu ASN BAPPEDA LITBANG Kota Bima yang masih belum merata.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

A. Tujuan dan Sasaran

BAPPEDA LITBANG sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk selalu tanggap dan responsif terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, BAPPEDA LITBANG juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada BAPPEDA LITBANG sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sampai tahun 2018 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA LITBANG Kota Bima 2013 - 2018. Adapun visi BAPPEDA LITBANG Kota Bima adalah: "MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN YANG KREDIBEL".

Visi tersebut merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh BAPPEDA LITBANG Kota Bima sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 3 (tiga) uraian misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran strategis.

Rumusan misi BAPPEDA LITBANG Kota Bima adalah:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan akuntabel.
- b. Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang berkualitas.

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA LITBANG Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.2.
Tujuan Jangka Menengah BAPPEDA LITBANG Kota Bima

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Anugerah PANGRIPTA Nusantara	10 Besar Nasional

Tabel 2.2.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA LITBANG Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase substansi RPJMD yang selaras dengan RPJPD	50%	60%	70%	85%	90%
		Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	60%	70%	80%	90%	95%
		Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD	75%	80%	85%	90%	95%
2.	Meningkatnya kinerja kelitbangan	Produk Inovasi Daerah	1	1	2	3	5

B. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun strategi yang ditempuh meliputi:

- a. Peningkatan perencanaan bidang ekonomi dan infrastruktur
- b. Peningkatan perencanaan bidang sosial dan Pemerintahan
- c. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- d. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah

c. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Adapun kebijakan yang ditempuh sebagai acuan pelaksanaan program kerja lima tahun ke depan meliputi :

- a. Optimalisasi sumberdaya manusia, sarana prasarana, dana dan metode kinerja.
- b. Meningkatkan koordinasi, transparansi, dan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam proses bottom up dan top down Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Meningkatkan eksistensi Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah.

Sedangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

Program pengembangan data/informasi

Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2D)

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang

Cipta Karya

Koordinasi Program NUSP - Phase 2

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Perencanaan Pengembangan Kota Hijau

Penyusunan Master Plan Drainase

Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Publik

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan rancangan RPJMD

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Penetapan RPJMD

Penyusunan rancangan RKPD

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Penetapan RKPD

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)

E – Planning

Koordinasi Pelaksanaan Anugerah Pangripta Nusantara

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Pengembangan Ekonomi Lokal

Program perencanaan sosial dan budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Penyusunan Profile Kesehatan

Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat

Koordinasi dan Advokasi Kota Layak Anak

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra

Penyusunan Profil Kelurahan

Koordinasi Aksi Pemberantasan Korupsi

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi

Penyusunan KLHS RPJMD

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pelayanan Izin Penelitian

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kelitbangan

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

BAPPEDA LITBANG Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi BAPPEDA LITBANG Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Penjelasan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA LITBANG Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase substansi RPJMD yang selaras dengan RPJPD	$\frac{\text{Program Prioritas dalam RPJMD}}{\text{Arah kebijakan RPJPD periode berkenaan}} \times 100\%$
		Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
		Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD	$\frac{\text{Jumlah kegiatan dalam RKPD yang dianggarkan}}{\text{Jumlah kegiatan dalam APBD}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kinerja kelitbangan	Produk Inovasi Daerah	

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BAPPEDA LITBANG Kota Bima tahun 2018 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2013-2018 dan dokumen Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA LITBANG tahun 2018.

Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase substansi RPJMD yang selaras dengan RPJPD	90%
		Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	95%
		Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD	95%
2.	Meningkatnya kinerja kelitbangan	Produk Inovasi Daerah	5%

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut:

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja BAPPEDA LITBANG Kota Bima pada awal tahun 2017 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama dengan anggaran sebesar Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 10 (sepuluh) program dengantotal anggaran sebesar Rp5.569.867.800,00.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja BAPPEDA LITBANG Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase substansi RPJMD yang selaras dengan RPJPD	90%
		Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	95%
		Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD	95%
2.	Meningkatnya kinerja kelitbangan	Produk Inovasi Daerah	5%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.119.841.167,00	APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	317.558.550,00	APBD
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	42.000.000,00	APBD
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	272.507.800,00	APBD
5. Pengembangan Data/Informasi	287.065.000,00	APBD
6. Kerjasama Pembangunan	726.076.500,00	APBD
7. Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	334.015.000,00	APBD
8. Perencanaan Pembangunan Daerah	2.133.058.744,00	APBD
9. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	60.485.000,00	APBD
10. Perencanaan Sosial Budaya	956.312.989,00	APBD
11. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1.238.680.000,00	APBD
12. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana	141.290.000,00	APBD
13. Penelitian dan Pengembangan Daerah	264.476.250,00	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja Bappeda Litbang merupakan suatu tahapan proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator sasaran, strategi dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Bappeda Litbang Kota Bima. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2018, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu, pertama: **Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah** dengan 3 (tiga) indikator kinerja meliputi: persentase substansi RPJMD yang selaras dengan RPJPD, Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD, Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD. Sedangkan sasaran strategis kedua adalah **Meningkatnya kinerja kelitbangan** dengan indikator kinerja sasarannya Produk inovasi daerah. Namun demikian, mengingat tahun 2018 adalah tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2013-2018, maka pengukuran capaian kinerja akan dimulai dengan menilai kinerja tujuan yaitu Meningkatkan kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan . Untuk mengetahui kinerja sasaran tahun 2017 dari target pencapaian, realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dapat dianalisis/dievaluasi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

Pencapaian Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2013-2018 bahwa tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2018 adalah meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan prestasi Anugerah POangripta Nusantara atau

yang sekarang sudah diganti dengan istilah Penghargaan Pembangunan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada akhir periode Renstra BAPPEDA LITBANG 2013-2018 perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan tersebut tercapai atau tidak.

Selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 dan 2018 Kota Bima berhasil memperoleh penghargaan terbaik I Anugerah Pangripta Nusantara/Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pada awal tahun 2018 masuk nominasi nasional yang dinilai lebih lanjut oleh Tim Penilai Pemerintah Pusat. Pada saat itu Kota Bima berada di urutan 11 daftar nominasi nasional dari 14 Nominator untuk Kategori Pemerintah Kota. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target indikator tujuan yaitu 10 besar nasional, maka capaian kerjanya mencapai 90,90% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Tujuan Tahun 2018

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Anugerah Pangripta Nusantara	10 besar nasional	Nominasi ke 11 dari 14 Nominator nasional	90,90%

Pencapaian Sasaran Strategis I :

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis I disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2018

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase substansi RPJMD yang selaras dengan RPJPD	90%	100%	111,11
	Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	95%	100%	105,26
	Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD	95%	100%	105,26

Penjabaran atas capaian kinerja ini diuraikan sebagaimana tabel 3.2. dan 3.3. berikut:

Tabel 3.2.
Evaluasi Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2018

NO	PROGRAM	RPJMD	RENSTRA	RKPD	RENJA	KUA/ PPAS	APBD
I	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
	Pendidikan						
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	√	√	√	√	√	√
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√	√	√
3	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√	√	√
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	√	√	√	√	√	√
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√	√	√
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	√	√	√	√	√	√
7	Program pendidikan non formal	√	√	√	√	√	√
8	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	√	√	√	√	√	√
9	Program Pendidikan Menengah	√	√	0	0	0	0
10	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	√	√	0	0	0	0
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	√	√	0	0	0	0
12	Program Penataan Peraturan perundang-undangan	√	√	0	0	0	0
	JUMLAH	12	12	8	8	8	8
	Kebudayaan						
13	Program Pengembangan Nilai Budaya	√	√	√	√	√	√
14	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	√	√	√	√	√	√
15	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	√	√	√	√	√	√
16	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	√	√	0	0	0	0

17	Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya	0	0	√	√	√	√
18	Program Fasilitas Penyelenggaraan Fasilitas Budaya	0	0	√	√	√	√
	JUMLAH	4	4	5	5	5	5
II	DINAS KESEHATAN						
19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
20	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√	√	√
21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√	√	√
22	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
23	Program obat dan perbekalan kesehatan	√	√	√	√	√	√
24	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√
25	Program Pengawasan Obat dan Makanan	√	√	√	√	√	√
26	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	√	√	0	0	0	0
27	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.	√	√	√	√	√	√
28	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	√	√	√	√	√	√
29	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	√	√	√	√	√	√
30	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	√	√	√	√	√	√
31	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	√	√	√	√	√	√
32	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.	√	√	√	√	√	√
33	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	√	√	√	√	√	√
34	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	√	√	√	√	√	√
35	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	√	√	√	√	√	√

36	Program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan KB	√	√	√	√	√	√
37	Kebijakan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan dan Hukum Kesehatan	0	0	√	√	√	√
38	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	0	√	√	√	√
	JUMLAH	18	18	19	19	19	19
III	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
39	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
40	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
41	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	0	0	0	0
42	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	0	0	0	0
43	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√	√	√
44	Program peningkatan jalan dan jembatan	√	√	√	√	√	√
45	Program pembangunan jalan dan jembatan	√	√	√	√	√	√
46	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	√	√	√	√	√	√
47	Program pembangunan turap/talud/bronjong	√	√	√	√	√	√
48	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	√	√	√	√	√	√
49	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	√	√	0	0	0	0
50	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	√	√	√	√	√	√
51	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	√	√	√	√	√	√
52	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	√	√	√	√	√	√
53	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	√	√	√	√	√	√
54	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	√	√	√	√	√	√

55	Program peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum	√	√	√	√	√	√
56	Program Perencanaan Tata Ruang	√	√	√	√	√	√
57	Program Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√	√	√
58	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	20	20	17	17	17	17
IV	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
59	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
60	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
61	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√	√	√
62	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	0	0	0	0
63	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√	√	√
64	Program pengembangan Perumahan	√	√	√	√	√	√
65	Program Lingkungan Sehat Perumahan	√	√	√	√	√	√
66	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	√	√	√	√	√	√
67	Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	0	0	0	0	0	0
68	Program Perencanaan Permukiman kumuh	√	√	0	0	0	0
69	Program Pengembangan Kawasan	0	0	0	0	0	0
70	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	√	√	√	√	√	√
71	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	0	0	√	√	√	√
72	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	0	0	√	√	√	√
	JUMLAH	10	10	10	10	10	10
V	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
71	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
72	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
73	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√	√	√

74	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	√	√	√	√	√	√
75	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√	√	√
76	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	√	√	√	√	√	√
77	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal	√	√	√	√	√	√
78	Program pengembangan wawasan kebangsaan	√	√	0	0	0	0
79	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	√	√	√	√	√	√
80	Program Reformasi Birokrasi	√	√	0	0	0	0
81	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	√	√	√	√	√	√
82	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	12	12	10	10	10	10
VI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
83	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
84	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
85	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√	√	√
86	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	0	0	0	0
87	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
88	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	√	√	√	√	√	√
89	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	√	√	√	√	√	√
90	Program Pendidikan Politik masyarakat	√	√	√	√	√	√
91	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menajaga Ketertiban dan Keamanan	0	0	√	√	√	√
	JUMLAH	8	8	8	8	8	8
VII	DINAS SOSIAL						
91	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√

92	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
93	Program peningkatan disiplin aparat	√	√	√	√	√	√
94	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
95	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	√	√	√	√	√	√
96	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√	√	√
97	Program Pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma	√	√	√	√	√	√
98	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	√	√	√	√	√	√
99	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	9	9	9	9	9	9
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
VIII	DINAS TENAGA KERJA						
100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
101	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
102	Program peningkatan disiplin aparat	0	0	√	√	√	√
103	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√	√	√
104	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	√	√	√	√	√	√
105	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	√	√	√	√	√	√
106	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	6	6	7	7	7	7
IX	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
107	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√

108	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
109	Program peningkatan disiplin aparat	0	0	√	√	√	√
110	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	0	0	0	0
111	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	√	√	√	√	√	√
112	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	√	√	√	√	√	√
113	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	√	√	√	√	√	√
114	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	√	√	√	√	√	√
115	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	√	√	√	√	√	√
116	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS	0	0	√	√	√	√
	JUMLAH	8	8	9	9	9	9
X	DINAS KETAHANAN PANGAN						
117	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
118	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
119	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√	√	√
120	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	√	√	√
121	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
122	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	√	√	√	√	√	√
123	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	√	√	√	√	√	√
124	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	√	√	0	0	0	0
	JUMLAH	8	8	7	7	7	7
XI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						

123	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
124	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
125	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	0	0	0	0
126	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√	√	√
127	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
128	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	√	√	√	√	√
129	Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√
130	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	√	√	√	√	√	√
131	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	√	√	√	√	√	√
132	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√
133	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	√	√	0	0	0	0
134	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	√	√	0	0	0	0
135	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	√	√	0	0	0	0
136	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	√	√	√	√	√	√
137	Program Peningkatan Pelayanan Kebersihan	√	√	0	0	0	0
138	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan	√	√	√	√	√	√
139	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Persampahan	0	0	0	0	0	0
140	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0	0	√	√	√	√
	JUMLAH	16	16	12	12	12	12
XII	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
141	Program Penataan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
142	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√	√	√
143	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√	√	√

144	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√	√	√
145	Program Penataan Administrasi Kependudukan	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	5	5	5	5	5	5
XIII	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
146	Program Penataan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
147	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0	0	√	√	√	√
148	Program peningkatan disiplin aparatur	0	0	√	√	√	√
149	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	√	√	√	√
150	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	0	√	√	√	√
151	Program Keluarga Berencana	√	√	√	√	√	√
152	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	√	√	√	√	√	√
153	Program Pelayanan Kontrasepsi	√	√	√	√	√	√
154	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	√	√	√	√	√	√
155	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	√	√	√	√	√	√
156	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS	√	√	√	√	√	√
157	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	√	√	√	√	√	√
158	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	9	9	13	13	13	13
XIV	DINAS PERHUBUNGAN						
159	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
160	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
161	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√	√	√
162	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√	√	√

163	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√	√	√
164	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	√	√	√	√	√	√
165	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	√	√	√	√	√	√
166	Program peningkatan pelayanan angkutan	√	√	√	√	√	√
167	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	√	√	√	√	√	√
168	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	√	√	√	√	√	√
169	Program Peningkatan Pelayanan Jasa Terminal	√	√	√	√	√	√
170	Program Perhubungan Laut	0	0	√	√	√	√
	JUMLAH	11	11	12	12	12	12
XV	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
171	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
172	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
173	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√	√	√
174	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√	√	√
175	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√	√	√
176	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	√	√	√	√	√	√
177	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	√	√	√	√	√	√
178	Program kerjasama informasi dengan mas media	√	√	√	√	√	√
179	Program Pengadaan Perangkat Aplikasi dan Telematika	√	√	√	√	√	√
180	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	√	√	√	√	√	√
181	Program Peningkatan Tata laksana Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√	√
182	Program Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Postel	√	√	√	√	√	√

	JUMLAH	12	12	12	12	12	12
XVI	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
181	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
182	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√	√	√
183	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√	√	√
184	Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	√	√	√
185	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√	√	√
186	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	√	√	0	0	0	0
187	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	√	√	0	0	0	0
188	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	√	√	√	√	√	√
189	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	√	√	√	√	√	√
190	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi dan UMKM	√	√	0	0	0	0
		10	10	7	7	7	7
	Perdagangan						
191	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	√	√	√	√	√	√
192	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	√	√	√	√	√	√
193	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	√	√	0	0	0	0
		3	3	2	2	2	2
	Perindustrian						
194	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	√	√	0	0	0	0
195	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	√	√	√	√	√	√
196	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	√	√	0	0	0	0

197	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	√	√	√	√	√	√
		4	4	2	2	2	2
	JUMLAH	17	17	11	11	11	11
XVII	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
198	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
199	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
200	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√	√	√
201	Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	0	√	√	√	√
202	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
203	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	√	√	√	√	√	√
204	Program Pembuatan Aplikasi Perijinan Online	√	√	0	0	0	√
205	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	√	√	0	0	0	0
206	Program Rencana Umum Penanaman Modal	√	√	0	0	0	0
207	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	9	9	7	7	7	7
XVIII	DINAS STATISTIK DAERAH						
208	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
209	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
210	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√	√	√
211	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	0	0	√	√	√	√
212	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
213	Program Pengembangan Statistik Daerah	√	√	√	√	√	√
214	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	6	6	7	7	7	7
XIX	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH						
215	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√

216	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
217	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√	√	√
218	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	√	√	√	√	√	√
219	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
220	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	√	√	√	√	√	√
221	Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi Kearsipan	√	√	√	√	√	√
222	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan	√	√	√	√	√	√
223	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	0	0	0	0	0	0
224	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	9	9	9	9	9	9
	Urusan Pilihan						
XX	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
225	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
226	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
227	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√	√	√
228	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	√	√	√
229	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
230	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	√	√	√	√	√	√
231	Program Peningkatan Keigatan Budaya Kelautan dan Wawasan maritim Kepada Masyarakat	0	0	√	√	√	√
232	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	√	√	0	0	0	0
233	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	√	√	0	0	0	0

234	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	√	√	0	0	0	0
235	Program pengembangan budidaya perikanan	√	√	√	√	√	√
236	Program pengembangan perikanan tangkap	√	√	√	√	√	√
237	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	√	√	√	√	√	√
238	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	13	13	11	11	11	11
XXI	DINAS PARIWISATA						
	Pariwisata						
239	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
240	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	√	√	√	√
241	Program peningkatan disiplin aparatur	0	0	√	√	√	√
242	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	0	√	√	√	√
243	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	√	√	√	√
244	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	√	√	√	√	√	√
245	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	√	√	√	√	√	√
246	Program Pengembangan Kemitraan	√	√	0	0	0	0
247	Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata	0	0	√	√	√	√
248	Program Pengembangan SDM Kepariwisataan	0	0	0	0	0	0
249	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	4	4	8	8	8	8
	Kepemudaan dan Olahraga						
250	Program peningkatan peran serta kepemudaan	√	√	√	√	√	√
251	Program pembinaan dan pemasaran olahraga	√	√	√	√	√	√
252	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	3	3	3	3	3	3
XXII	DINAS PERTANIAN						

253	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
254	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
255	Program peningkatan disiplin aparat	√	√	√	√	√	√
256	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	√	√	√
257	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
258	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	√	√	√	√	√	√
259	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	√	√	√	√	√	√
260	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	√	√	0	0	0	0
261	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	√	√	√	√	√	√
262	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	√	√	√	√	√	√
263	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	√	√	√	√	√	√
264	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	√	√	√	√	√	√
265	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	13	13	12	12	12	12
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
XXIII	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						
XXIV	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA						
XXV	SEKRETARIAT DAERAH						
266	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
267	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
268	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√	√	√
269	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√	√	√
270	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	√	√	√	√	√	√

271	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	√	√	√	√	√
272	Program Promosi Daerah	0	0	0	0	0	0
273	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	√	√	√	√	√	√
274	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV AIDS	0	0	√	√	√	√
275	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	√	√	√	√	√	√
276	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	0	0	√	√	√	√
277	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√
278	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√	√	√	√
279	Program Penataan Daerah Otonom Baru	√	√	√	√	√	√
280	Program Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	√	√	√	√	√	√
281	Program Administasi Kerjasama Pembangunan	√	√	√	√	√	√
282	Program Peningkatan kapastitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√	√	√
283	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	√	√	√	√	√	√
284	Program Percepatan Reformasi Birokrasi	0	0	√	√	√	√
285	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	√	√	√
286	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	0	0	0	0	0	0
287	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan	0	0	√	√	√	√
288	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	0	0	√	√	√	√
289	Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat	0	0	0	0	0	0
290	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	16	16	21	21	21	21
XXVI	SEKRETARIAT DPRD						

291	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
292	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
293	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√	√	√
294	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√	√	√
295	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
296	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	6	6	6	6	6	6
XXVII	KECAMATAN RASANA E BARAT						
297	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
298	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
299	Program peningkatan disiplin aparat	√	√	√	√	√	√
300	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
301	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	√	0	0	0	0
302	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	√	√	0	0	0	0
303	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	√	1	√	√	√
304	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	√	√	0	0	0	0
305	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan	√	√	0	0	0	0
306	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	√	√	√	√	√	√
307	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	√	√	√
308	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	0	0	√	√	√	√
309	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	12	12	9	9	9	9

XXVIII	KECAMATAN RASANAE TIMUR						
310	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
311	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
312	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	0	0	0	0
313	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
314	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	√	0	0	0	0
315	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	√	√	0	0	0	0
316	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	√	√	√	√	√
317	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	√	√	0	0	0	0
318	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan	√	√	0	0	0	0
319	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	√	√	√	√	√	√
320	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	√	√	√
321	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	0	0	√	√	√	√
322	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	12	12	8	8	8	8
XXIX	KECAMATAN ASAKOTA						
323	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
324	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
325	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	0	0	0	0
326	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
327	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	√	0	0	0	0
328	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	√	√	0	0	0	0

329	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	√	0	0	0	0
330	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	√	√	0	0	0	0
331	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan	√	√	0	0	0	0
332	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	√	√	√	√	√	√
333	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	√	√	√
334	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	0	0	√	√	√	√
335	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	12	12	7	7	7	7
XXX	KECAMATAN MPUNDA						
336	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
337	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
338	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	0	0	0	0
339	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
340	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	√	0	0	0	0
341	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	√	√	0	0	0	0
342	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	√	√	√	√	√
343	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	√	√	0	0	0	0
344	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan	√	√	0	0	0	0
345	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	√	√	√	√	√	√
346	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	√	√	√
347	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	0	0	√	√	√	√

348	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	12	12	8	8	8	8
XXXI	KECAMATAN RABA						
349	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
350	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
351	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√	√	√
352	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
353	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	√	0	0	0	0
354	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	√	√	0	0	0	0
355	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	√	√	√	√	√
356	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	√	√	0	0	0	0
357	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan	√	√	0	0	0	0
358	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	√	√	√	√	√	√
359	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	√	√	√
360	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	0	0	√	√	√	√
361	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	12	12	9	9	9	9
XXXII	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
362	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
363	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
364	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√	√	√
365	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	0	0	0	0

366	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√	√	√
367	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√	√	√	√
368	Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana	√	√	√	√	√	√
369	Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan Bencana	√	√	√	√	√	√
370	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	√	√	√	√	√	√
371	Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat	√	√	√	√	√	√
372	Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar	√	√	√	√	√	√
373	Program Rehabilitasi	√	√	√	√	√	√
374	Program Rekonstruksi	√	√	√	√	√	√
375	Program kesiapsegiaan	√	√	√	√	√	√
376	Program Peringatan Dini	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	15	15	14	14	14	14
XXXIII	INSPEKTORAT						
377	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
378	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
379	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√	√	√
380	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√	√	√
381	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
382	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
383	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	√	√	√	√	√	√
384	Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	√	√	√	√	√	√
385	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	√	√	√	√	√	√

386	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi	√	√	0	0	0	0
387	Program mengintensikan penanganan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	11	11	10	10	10	10
XXXIV	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
388	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
389	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
390	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√	√	√
391	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
392	Program Kerjasama Pembangunan	√	√	√	√	√	√
393	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	√	√	√	√	√	√
394	Program Pengembangan Data/Informasi	√	√	√	√	√	√
395	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan	0	0	√	√	√	√
396	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√	√	√	√	√
397	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	√	√	√	√	√	√
398	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	√	√	√	√	√	√
399	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber daya alam	√	√	√	√	√	√
400	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	√	√	0	0	0	0
401	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	√	√	0	0	0	0
402	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil	0	0	√	√	√	√
	JUMLAH	13	13	13	13	13	13
XXXV	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)						
403	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
404	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
405	Program peningkatan disiplin aparat	√	√	√	√	√	√

406	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	0	0	0	0
407	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
408	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	√	√	√	√	√	√
409	Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√	√
410	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	8	8	7	7	7	7
XXXVI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPKD)						
XXXVII	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√	√
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√	√	√
413	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√	√	√
414	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
415	Program Pendidikan Kedinasan	√	√	√	√	√	√
416	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	0	0	0	0
417	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	7	7	6	6	6	6
	JUMLAH TOTAL	378	378	349	349	349	349
A	Presentase SKPD yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD						100%
B	Presentase Program RENSTRA yang Selaras dengan RPJMD						100%
C	Presentase Program RKPD yang Selaras dengan RPJMD						100%
D	Presentase Program RENJA yang Selaras dengan RKP						100%
E	Presentase Dokumen RKP dalam KUA/PPAS						100%
F	Presentase Dokumen KUA/PPAS dalam APBD						100%

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA LITBANG, 2018

Tabel 3.3.
Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah sesuai Ketentuan yang Berlaku

No	Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen sesuai PerPres No. 29/2014 dan
----	------------------	---------	--

		Perencanaan sesuai Permendagri No. 54/2010		PermenPAN&RB No.53/2014				
		RENSTRA	RENJA	PK	IKU	RKT	RENAKSI	MONEV
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	√	√	√	√	√	√	√
2	DINAS KESEHATAN	√	√	√	√	√	√	√
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	√	√	√	√	√	√	√
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	√	√	√	√	√	√	√
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	√	√	√	√	√	√	√
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	√	√	√	√	√	√	√
7	DINAS SOSIAL	√	√	√	√	√	√	√
8	DINAS TENAGA KERJA	√	√	√	√	√	√	√
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	√	√	√	√	√	√	√
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	√	√	√	√	√	√	√
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	√	√	√	√	√	√	√
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	√	√	√	√	√	√	√
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	√	√	√	√	√	√	√
14	DINAS PERHUBUNGAN	√	√	√	√	√	√	√
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	√	√	√	√	√	√	√
16	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	√	√	√	√	√	√	√
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	√	√	√	√	√	√	√
18	DINAS STATISTIK DAERAH	√	√	√	√	√	√	√
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	√	√	√	√	√	√	√
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	√	√	√	√	√	√	√
21	DINAS PARIWISATA	√	√	√	√	√	√	√
22	DINAS PERTANIAN	√	√	√	√	√	√	√
23	SEKRETARIAT DAERAH	√	√	√	√	√	√	√
24	SEKRETARIAT DPRD	√	√	√	√	√	√	√
25	KECAMATAN RASANA E BARAT	√	√	√	√	√	√	√
26	KECAMATAN RASANA E TIMUR	√	√	√	√	√	√	√
27	KECAMATAN ASAKOTA	√	√	√	√	√	√	√
28	KECAMATAN MPUNDA	√	√	√	√	√	√	√
29	KECAMATAN RABA	√	√	√	√	√	√	√
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	√	√	√	√	√	√	√
31	INSPEKTORAT	√	√	√	√	√	√	√
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	√	√	√	√	√	√	√
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	√	√	√	√	√	√	√
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	√	√	√	√	√	√	√
	JUMLAH	34	34	34	34	34	34	34
	PERSENTASE (%)	100	100	100	100	100	100	100
	RATA-RATA (%)							100

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA LITBANG, 2018

Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis I pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2018 BAPPEDA LITBANG Kota Bima mengalami peningkatan capaian kinerja. Gambaran realisasi kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja BAPPEDA LITBANG
dalam Pencapaian Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase substansi RPJMD yang selaras dengan RPJPD	90%	100%	111,11	90%	100%	111,11
Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	90%	88,95%	98,83	95%	100%	105,26
Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD	90%	100%	111,11	95%	100%	105,26
Rata-rata			107,01			107,21

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA LITBANG, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja dengan indikator sasaran strategis I menunjukkan bahwa pada tahun 2017 memiliki rata-rata capaian 107,01%, sedangkan di tahun 2018 menunjukkan peningkatan capaian menjadi 107,21%. Hal ini berarti terdapat peningkatan kinerja 0,20% pada tahun 2018. Rendahnya angka peningkatan kinerja tersebut disebabkan target kinerja pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan target pada tahun 2017.

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA BAPPEDA LITBANG tahun 2013-2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Persentase substansi RPJMD yang selaras dengan RPJPD dalam Renstra ditargetkan sebesar 90 persen telah dicapai 111,11%.

2. Indikator kinerja Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD telah mencapai 105,26 persen dari target yang telah ditetapkan pada akhir periode Renstra
3. Indikator kinerja Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD telah mencapai 105,26 persen dari target yang telah ditetapkan pada akhir periode Renstra.

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA BAPPEDA LITBANG tahun 2013-2018 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5.
Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka Menengah (2018)	Realisasi per Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase substansi RPJMD yang selaras dengan RPJPD	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	95%	88,16%	88,66%	97,15%	98,835%	100%
	Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD	95%	97%	96%	96%	100%	100%

Sumber: Hasil Analisa BAPPEDA LITBANG, 2018

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I tersebut, selama tahun 2018, BAPPEDA LITBANG Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan yang juga merupakan implementasi dari Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) serta Pejabat eselon III (Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6.
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN (%)
1	3	4	5	6	7
4.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	Nilai LKIP Bappeda	BB	BB	100,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN (%)
1	3	4	5	6	7
	PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen realisasi Renja triwulan	4	4	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dokumen laporan keuangan semesteran	1	1	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun sesuai SAP	4	4	100,00
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Dokumen Renja, RKA, DPA, DPPA	4	4	100,00
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Dokumen LAKIP, LPJ, dan LPPD	3	3	100,00
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Cakupan ketersediaan data dan informasi	30,00	27,36	91,20
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	Dokumen data penduduk miskin Daerah	1	1	100,00
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima	Dokumen Data dan informasi tata ruang wilayah	1	1	100,00
6.	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Cakupan kerjasama pembangunan bidang kemiskinan dan keciptakaryaan	50,00	69,62	139,24
	Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	Laporan TKPKD	1	1	100,00
	Koordinasi review rencana program dan investasi jangka menengah bidang cipta karya	Laporan Reviu RPIJM	1	1	100,00
	Koordinasi Program NUSP - Phase 2	Laporan pelaksanaan koordinasi	1	1	100,00
7.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	Persentase program/kegiatan rencana kegiatan sector strategis dalam RKPD	20,00	23,31	116,55
	Koordinasi dan advokasi Percepatan Pembangunan SanitasiPemukiman (PPSP)	Dokumen BPS dan MPS	2	2	100,00
	Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	Dokumen perencanaan kota hijau	4	4	100,00
	Penyusunan Masterplan Drainase	Masterplan drainase	2	1	50,00
	Perencanaan pengembangan Ruang Terbuka Publik	Dokumen pengembangan ruang terbuka hijau	2	2	100,00
8.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan	50	10	20,00
	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Cakupan aparatur perencana yang terlatih	50	10	20,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN (%)
1	3	4	5	6	7
9.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan tahunan (RKPD+Renja) yang selaras dengan (RPJMD+Renstra)	100,00	100,00	100,00
	Penyusunan rancangan RPJMD	Dokumen rancangan RPJMD	1	1	100,00
	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Dokumen laporan hasil musrenbang RPJMD	5	5	100,00
	Penetapan RPJMD	Perda tentang RPJMD	1	1	100,00
	Penyusunan rancangan RKPD	Dokumen rancangan RKPD	1	1	100,00
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Dokumen laporan hasil musrenbang RKPD	1	1	100,00
	Penetapan RKPD	Perwali tentang RKPD	1	1	100,00
	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota Tahun 2017	1	1	100,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen Laporan Realisasi Renja per triwulan	4	4	100,00
	PerencanaanPengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH CukaiTembakau)	Laporan Koordinasi DBH CT	4	4	100,00
	E - Planning	Aplikasi E-Planning	1	0,5	50,00
	Koordinasi Pelaksanaan Anugerah Pangripta Nusantara	Hasil penilaian APN tingkat Provinsi	1	1	100,00
10.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase Program Renja SKPD Bidang Ekonomi yang Selaras dengan RKPD	98,00	97,98	99,98
	Pengembangan Ekonomi Lokal	Dokumen masterplan pengembangan ekonomi lokal	1	2,	200,00
11.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Program Renja SKPD Bidang Sosial Budaya yang Selaras dengan RKPD	98,00	95,54	97,49
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang social dan budaya	Laporan pelaksanaan koordinasi	4	4	100,00
	Penyusunan Profile Kesehatan	Dokumen Profil Kesehatan	1	1	100,00
	Koordinasidan Advokasi Kota Sehat	Laporan Koordinasi	1	1	100,00
	Koordinasi danAdvokasi Kota LayakAnak	Laporan Koordinasi	1	1	100,00
	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program KeluargaHarapan	Laporan pengendalian kegiatan PKH	2	1	50,00
	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	LaporanKoordinasi	1	1	100,00
	Penyusunan Profil Kelurahan	Dokumen profil Kelurahan	11	11	100,00
	Koordinasi Aksi Pemberantasan Korupsi	LaporanKoordinasi	1	1	100,00
12.	PROGRAM PERANCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN	Persentase Program Renja SKPD Bidang Prasarana Wilayah dan	95,00	95,00	100,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN (%)
1	3	4	5	6	7
	SUMBER DAYA ALAM	SDA yang selaras dengan RKPD			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi	Laporan Koordinasi	3	3	100,00
	Penyusunan KLHS RPJMD	Dokumen KLHS RPJMD	1,00	1,00	100,00

Sumber: Dokumen Penetapan Kinerja BAPPEDA LITBANG 2019

Pencapaian Sasaran Strategis II

Meningkatnya kinerja kelitbangan

Penelitian dan pengembangan merupakan titik awal dari seluruh rangkaian proses perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan. Hasil penelitian dan pengembangan (litbang) yang akurat dalam bentuk konsep, model maupun skenario serta kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul pada suatu daerah mulai dari penanganan bencana hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktifitas berbagai sektor pembangunan. Kelembagaan litbang seharusnya menjadi garda terdepan sebagai lembaga *think thank* dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sudah seharusnya melalui kajian dan litbang (*research based policy*) sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 dan Pasal 219 yang mengamanatkan pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan, pelatihan, dan penelitian pengembangan. Selain itu Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan bahwa penelitian pengembangan akan sangat berkaitan erat dengan penilaian inovasi daerah. Lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah mengatur tentang pentingnya untuk menyusun rencana induk kelitbangan, membangun data base kelitbangan,

dan pelaku kelitbangan. Oleh karena itu, indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya pengorganisasian kelitbangan sesuai dengan ketentuan meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2018 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.7.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis II Tahun 2018

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kinerja kelitbangan	Produk Inovasi Daerah	5	6	120

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA LITBANG, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator Produk Inovasi Daerah pada tahun 2018 adalah melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian kinerja 120%. Capaian yang demikian dapat ditunjukkan oleh tersedianya 6 inovasi seperti pengembangan vidiotron untuk informasi pasar, pengembangan aplikasi simone untuk kegiatan money Renja, RKPD, dan RPJMD, Teknologi tepat guna pemotong plastik, teknologi servis bolham lampu dan aki yang mati

Adapun perbandingan capaian dari indikator produk inovasi daerah dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya adalah produk inovasi pada tahun 2018 lebih banyak 4 produk dibandingkan dengan pada tahun 2017 yang hanya 2 produk. Kemudian perbandingan capaian kinerja tahun 2018 terhadap terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA BAPPEDA LITBANG tahun 2018 telah melebihi target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 120% dimana target RENSTRA tahun 2018 sebesar 5 produk sedangkan capaian sampai saat ini telah mencapai 6 produk. Namun demikian, disadari bahwa produk inovasi ini belum masuk dalam kategori inovasi daerah unggulan, tapi setidaknya menjadi stimulus muncul produk inovasi daerah yang lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang.

Tabel 3.8.

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis II terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target Akhir Periode RENSTRA (2018)	Realisasi per Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kinerja kelitbangan	Produk Inovasi Daerah	5	0	0	1	4	6

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA LITBANG, 2019

Pencapaian sasaran strategis II tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan yang merupakan implementasi dari perjanjian kinerja (PK) eselon III dan IV, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11.

Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis II

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN (%)
1	3	4	5	6	7
13.	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang diakomodir dalam RKPD	1,00	1,26	126,00
	Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	Laporan Kegiatan	1,00	1,00	100,00
14.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan daerah	10,00	9,7	0,00
	Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	Laporan Koordinasi	1,00	1,00	100,00
	Pelayanan Izin Penelitian	Jumlah izin penelitian yang diterbitkan	100	97	97
	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kelitbangan	Perwali Rencana Induk Kelitbangan	1,00	1,00	100,00

Sumber : Dokumen Penetapan Kinerja BAPPEDA LITBANG 2018

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis BAPPEDA LITBANG Kota Bima tersebut di atas, maka dapat diperoleh rata-rata kinerja yang diperoleh dari rata-rata akumulasi capaian setiap indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis seperti sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase substansi RPJMD yang selaras dengan RPJPD	90%	100%	111,11
	Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	95%	100%	105,26
	Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD	95%	100%	105,26
Meningkatnya kinerja kelitbangan	Produk Inovasi Daerah	5	6	120
Rata-rata				110,41

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA LITBANG, 2018

Pengukuran kinerja tersebut di atas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan BAPPEDA LITBANG Kota Bima. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun berkenaan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA BAPPEDA LITBANG Kota Bima sehingga tergambar capaian target jangka menengah sampai tahun 2018.

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain: (1) tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup dan memadai; (2) tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan (3) tersedianya anggaran yang cukup.

Sumber daya manusia BAPPEDA LITBANG Kota Bima hingga akhir tahun 2018, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S2	10	27,78%
2.	S1	23	63,89%
3.	Diploma 3	1	2,78%
4.	SMA / sederajat	2	5,55%
Total		36	100%

Sumber: BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019

Tabel 3.14.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	6	16,67%
2.	Golongan III	28	77,78%
3.	Golongan II	2	5,55%
4.	Golongan I	-	-
Total		36	100%

Sumber : BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019

Tabel 3.15.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	2,78%
2.	Eselon III	4	11,11%
3.	Eselon IV	11	30,56%
4.	Non-Eselonering	20	55,55%
Total		36	100%

Sumber : BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2018

Berdasarkan profil SDM aparatur di atas diketahui bahwa pegawai BAPPEDA LITBANG Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 23 orang (63,89%) adalah Strata 1, selanjutnya 10 orang (27,78%) memiliki tingkat pendidikan Strata 2, dan lainnya berpendidikan D.III dan SMA/ sederajat. Selanjutnya, berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai BAPPEDA LITBANG Kota Bima 77,78% atau sebanyak 28 orang adalah Golongan III, 6 orang (16,67%) Golongan IV, dan sisanya 2 orang adalah pegawai golongan II.

Walaupun berdasarkan jenjang pendidikan, golongan dan pangkat, sebagian besar aparatur BAPPEDA LITBANG Kota Bima cukup memadai, namun mengingat tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan cenderung kompleks, maka masih dibutuhkan peningkatan keterampilan khusus perencana guna meningkatkan sumber daya aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak yang relevan.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran seluruh kegiatan BAPPEDA LITBANG Kota Bima tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp 10.146.226.848,10 dan terealisasi sebesar Rp 8.718.644.382,00 atau sebesar 85,93%. Anggaran ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dari target belanja operasi sebesar Rp 10.022.276.848,10 , BAPPEDA LITBANG Kota Bima merealisasikan sebesar Rp 8.648.094.382,00 atau sebesar 86,29%. Adapun belanja modal, dari target yang ditetapkan sebesar Rp123.950.000,00, direalisasikan sebesar Rp 70.550.000,00 atau sebesar 56,92%.

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.16.
Rekapitulasi Belanja BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Operasi	10.022.276.848,10	8.648.094.382,00	86,29
2	Belanja Modal	123.950.000,00	70.550.000,00	56,92
	Jumlah	10.146.226.848,10	9.352.970.767,00	85,93

Sumber: Laporan Keuangan BAPPEDA LITBANG T.A. 2018

3.2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17.
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung
Pencapaian Sasaran Strategis BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	57.683.000,00	57.683.000,00	100,00
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	26.128.800,00	26.128.000,00	100,00
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	19.628.000,00	19.628.000,00	100,00
		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	102.318.000,00	102.318.000,00	100,00
		Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	66.750.000,00	66.750.000,00	100,00
		Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	45.815.000,00	44.315.000,00	96,73
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima	241.250.000,00	202.539.532,00	83,95

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	116.076.500,00	101.996.500,00	87,87
Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya	154.500.000,00	62.100.000,00	40,19
Koordinasi Program NUSP - Phase 2	455.500.000,00	70.521.107,00	15,48
Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	39.400.000,00	33.850.000,00	85,91
Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	22.355.000,00	22.110.000,00	98,90
Penyusunan Master Plan Drainase	155.000.000,00	56.700.000,00	36,58
Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Publik	117.260.000,00	58.788.028,00	50,13
Penyusunan rancangan RPJMD	132.525.000,00	131.131.200,00	98,95
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	106.000.000,00	93.075.000,00	87,81
Penetapan RPJMD	271.264.500,00	261.346.900,00	96,34
Penyusunan rancangan RKPD	120.878.000,00	112.078.000,00	92,72
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	415.044.231,00	412.504.231,00	99,39
Penetapan RKPD	163.953.000,00	163.953.000,00	100,00
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	331.830.000,00	331.325.000,00	99,85
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	317.000.000,00	312.162.342,00	98,47
Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	140.000.000,00	112.598.032,00	80,43
E - Planning	109.519.013,00	103.519.013,00	94,52
Koordinasi Pelaksanaan Anugerah Pangripta Nusantara	25.045.000,00	25.045.000,00	100,00
Pengembangan Ekonomi Lokal	60.485.000,00	57.185.000,00	94,54
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	472.527.003,00	416.298.597,00	88,10
Penyusunan Profile Kesehatan	72.100.000,00	70.350.000,00	97,57
Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	60.555.311,00	60.455.311,00	99,83
Koordinasi dan Advokasi Kota Layak Anak	96.266.355,00	96.106.355,00	99,83
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	91.781.220,00	89.031.220,00	97,00

		Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	58.100.000,00	58.100.000,00	100,00
		Penyusunan Profil Kelurahan	63.200.000,00	63.200.000,00	100,00
		Koordinasi Aksi Pemberantasan Korupsi	41.783.100,00	41.533.100,00	99,40
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi	1.001.165.000,00	550.230.245,00	54,96
		Penyusunan KLHS RPJMD	237.515.000,00	231.984.390,00	97,67
2	Meningkatnya kinerja kelitbangan	Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	141.290.000,00	136.092.650,00	96,32
		Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	119.699.780,00	107.501.825,00	89,81
		Pelayanan Izin Penelitian	62.830.000,00	61.480.000,00	97,85
		Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kelitbangan	81.946.470,00	79.930.000,00	97,54

Sumber: Laporan Keuangan BAPPEDA LITBANG T.A. 2018

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, BAPPEDA LITBANG Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.18.
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin
BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2018

No.	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	145.982.500,00	140.932.500,00	96,54
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53.400.000,00	30.945.580,00	57,95
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17.250.000,00	12.455.000,00	72,20
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	78.337.500,00	77.707.500,00	99,20
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.605.000,00	14.800.000,00	79,55
		Penyediaan alat tulis kantor	60.680.000,00	60.680.000,00	100,00
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48.900.000,00	48.866.000,00	99,93
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.624.000,00	19.624.000,00	100,00

		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	49.200.000,00	48.650.000,00	98,88
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	76.600.000,00	65.430.000,00	85,42
		Penyediaan makanan dan minuman	40.860.000,00	40.860.000,00	100,00
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	491.787.167,00	488.468.679,00	99,33
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	17.415.000,00	17.010.000,00	97,67
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	91.682.500,00	91.082.500,00	99,35
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	121.500.000,00	99.300.000,00	81,73
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	104.376.050,00	100.723.050,00	96,50
Sumber: Laporan Keuangan BAPPEDA LITBANG T.A. 2018					

3.2.3. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara input dengan output baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome yang lebih besar dari pada realisasi keuangan dan atau capaian output mencapai diatas 100,00% menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja dikategorikan efektif. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian output lebih kecil dari pada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja diklasifikasikan tidak efektif. Sedangkan apabila terjadi capaian output sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **sesuai harapan**.

Efektifitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator output/*outcome*, *benefit* dan *impact* dari kegiatan yang bersangkutan. Efektifitas kegiatan dibagi atas dua macam, yaitu : (a) efektifitas individual kegiatan; (b) efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran. Adapun gambaran analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja sebagaimana disajikan dalam table berikut :

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Capain Kinerja	Realisasi	Efektifitas
-----	-------------------	------------------	----------------	-----------	-------------

			(%)	Anggaran (%)	
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00	100,00	Sesuai harapan
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100,00	100,00	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100,00	100,00	
		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	100,00	100,00	
		Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	100,00	100,00	
		Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	100	96,73	Efisien
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima		83,95	
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		87,87	
		Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya		40,19	
		Koordinasi Program NUSP - Phase 2		15,48	
		Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)		85,91	
		Perencanaan Pengembangan Kota Hijau		98,90	
		Penyusunan Master Plan Drainase		36,58	
		Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Publik		50,13	
		Penyusunan rancangan RPJMD	100,00	98,95	
		Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	100,00	87,81	
		Penetapan RPJMD	100,00	96,34	
		Penyusunan rancangan RKPD	100,00	92,72	
		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	100,00	99,39	
		Penetapan RKPD	100,00	100,00	
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	100,00	99,85			
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100,00	98,47			
Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai	100,00	80,43			

		Tembakau)		
		E - Planning	50,00	94,52
		Koordinasi Pelaksanaan Anugerah Pangripta Nusantara	100,00	100,00
		Pengembangan Ekonomi Lokal		94,54
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya		88,10
		Penyusunan Profile Kesehatan		97,57
		Koordinasi danAdvokasi Kota Sehat		99,83
		Koordinasi dan Advokasi Kota Layak Anak		99,83
		Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan		97,00
		Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra		100,00
		Penyusunan Profil Kelurahan		100,00
		Koordinasi Aksi Pemberantasan Korupsi		99,40
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi		54,96
		Penyusunan KLHS RPJMD		97,67
2	Meningkatnya kinerja kelitbangan	Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)		96,32
		Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan		89,81
		Pelayanan Izin Penelitian		97,85
		Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kelitbangan		97,54

BAB IV PENUTUP

4.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Bima tahun 2018 memiliki nilai strategis karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2018 merupakan tahun kelima RPJMD Kota Bima 2013-2018 dan RENSTRA BAPPEDA LITBANG Tahun 2013-2018.

Sebagai bagian penutup dari LKIP BAPPEDA LITBANG ini dapat disimpulkan bahwa secara umum BAPPEDA LITBANG telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2018.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2018 semuanya telah direalisasikan dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 110,41%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 85,93%.

Rata-rata capaian sasaran strategis I adalah sebesar 107,21 % yang terukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 120 %.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2017 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian, dan pelaporan pada tahun 2017 telah berjalan dengan baik.

4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja BAPPEDA LITBANG Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi BAPPEDA LITBANG sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA LITBANG melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini dandalamrangka memperkuat peran kelembagaan BAPPEDA LITBANG Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang lebih baik di masa yang akan datang, makaperlubeberapa langkah tindaklanjutyang dapat diupayakan untuktahunberikutnyasepertisebagaiberikut:

1. Penyusunan dan penyediaan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah untuk menjadi dasar implementasi perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan serta pengendalian hasil perencanaan. Dengan peraturan daerah ini juga akan meningkatkan integrasi dan penyelarasan antar dokumen perencanaan maupun antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Pengembangan sistem aplikasi perencanaan yang berbasis teknologi informasi dalam bentuk *e-Planning* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
3. Mengembangkan fungsional perencana yang telah dimiliki oleh BAPPEDA LITBANG serta mendorong tumbuhnya kader-kader fungsional perencana yang diharapkan akan dapat membawa BAPPEDA LITBANG Kota Bima

menjadi institusi perencana pembangunan daerah yang kredibel dan professional. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan.

4. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami LKIP BAPPEDA LITBANG Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan BAPPEDA LITBANG Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

No	PROGRAM	RPJMD	RKPD	KUA/PPAS	APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Pendidikan				
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	√	√	√	√
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√
3	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	√	√	√	√
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	√	√	√	√
7	Program pendidikan non formal	√	√	√	√
8	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	√	√	√	√
9	Program Pendidikan Menengah	√			
10	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	√	√	√	√
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	√	√	√	√
12	Program Penataan Peraturan perundang-undangan	√			
	JUMLAH	12	10	10	10
	Kebudayaan				
13	Program Pengembangan Nilai Budaya	√	√	√	√
14	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	√	√	√	√
15	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	√	√	√	√
16	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	√	√	√	
17	Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya				√
	JUMLAH	4	4	4	4
II	DINAS KESEHATAN				
18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
19	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√
20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
21	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
22	Program obat dan perbekalan kesehatan	√	√	√	√
23	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√
24	Program Pengawasan Obat dan Makanan	√	√	√	√
25	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	√	√	√	√
26	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.	√	√	√	√
27	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	√	√	√	√
28	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	√	√	√	√
29	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	√	√	√	√
30	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	√	√	√	√
31	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.	√	√	√	√
32	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	√	√	√	
33	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	√	√	√	√
34	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	√	√	√	√
35	Program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan KB	√	√	√	√
	JUMLAH	18	18	18	17
III	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
36	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
37	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
38	Program peningkatan disiplin aparatur	√			√
39	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√			√
40	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√
41	Program peningkatan jalan dan jembatan	√			√
42	Program pembangunan jalan dan jembatan	√	√	√	√
43	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	√	√	√	√
44	Program pembangunan turap/talud/bronjong	√	√	√	√
45	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	√	√	√	√
46	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	√			√
47	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	√	√	√	√
48	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	√	√	√	√
49	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	√	√	√	√
50	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	√	√	√	√
51	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	√	√	√	√
52	Program peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum	√	√	√	√
53	Program Perencanaan Tata Ruang	√	√	√	√
54	Program Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√
55	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√
	JUMLAH	20	16	16	20
IV	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
56	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
57	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
58	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
59	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√			
60	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√
61	Program pengembangan Perumahan	√	√	√	√
62	Program Lingkungan Sehat Perumahan	√	√	√	√
63	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	√	√	√	√
64	Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial				√
65	Program Perencanaan Permukiman kumuh	√			√
66	Program Pengembangan Kawasan				√
67	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	√	√	√	√
68	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan		√	√	√

69	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		√	√	
	JUMLAH	10	10	10	12
V	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
70	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
71	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
72	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
73	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	√	-	-	√
74	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√
75	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	√	√	√	√
76	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal	√	√	√	√
77	Program pengembangan wawasan kebangsaan	√	-	-	-
78	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	√	√	√	√
79	Program Reformasi Birokrasi	√	-	-	-
80	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	√	√	√	-
81	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	√	-	-	√
	JUMLAH	12	8	8	9
VI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
82	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
83	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
84	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
85	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	-	-	-
86	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
87	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	√	√	√	√
88	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	√	√	√	√
89	Program Pendidikan Politik masyarakat	√	√	√	√
	JUMLAH	8	7	7	7
VII	DINAS SOSIAL				
90	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
91	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
92	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	
93	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
94	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya	√	√	√	√
95	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√
96	Program Pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma	√	√	√	√
97	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	√	√	√	√
98	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√
	JUMLAH	9	9	9	8
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
VIII	DINAS TENAGA KERJA				
99	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√			√
100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√			√
101	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√			√
102	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	√	√	√	√
103	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	√	√	√	√
104	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	√	√	√	√
	JUMLAH	6	3	3	6
IX	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
105	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
106	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
107	Program peningkatan disiplin aparatur		√	√	√
108	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	
109	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	√	√	√	√
110	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	√	√	√	√
111	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	√	√	√	√
112	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	√	√	√	√
113	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	√	√	√	√
	JUMLAH	8	9	9	8
X	DINAS KETAHANAN PANGAN				
114	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
115	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
116	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
117	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	x	x	√
118	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
119	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	√	√	√	√
120	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	√	√	√	√
121	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	√	√	√	x
	JUMLAH	8	7	7	7
XI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
122	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
123	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
124	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
125	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
126	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
127	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
128	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
129	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
130	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
131	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	√	√	√
132	Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	√	√	√	√
133	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	√	√	√	√
134	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	√	√	√	√
135	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	√	√	√	√

136	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	√			
137	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	√	√	√	√
138	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	√	√	√	
139	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	√	√	√	√
140	Program Peningkatan Pelayanan Kebersihan	√	√	√	
141	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan	√	√	√	√
142	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Persampahan		√	√	
	JUMLAH	20	20	20	17
XII	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
143	Program Penataan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
144	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√
145	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
146	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√
147	Program Penataan Administrasi Kependudukan	√	√	√	√
	JUMLAH	5	5	5	5
XIII	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
148	Program Keluarga Berencana	√	√	√	√
149	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	√	√	√	√
150	Program Pelayanan Kontrasepsi	√	√	√	√
151	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	√	√	√	√
152	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	√	√	√	√
153	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS	√	√	√	√
154	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	√	√	√	√
155	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	√	√	√	√
	JUMLAH	8	8	8	8
XIV	DINAS PERHUBUNGAN				
156	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
157	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
158	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
159	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
160	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√
161	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	√	√	√	√
162	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	√	√	√	√
163	Program peningkatan pelayanan angkutan	√	√	√	√
164	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	√	√	√	√
165	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	√	√	√	√
166	Program Peningkatan Pelayanan Jasa Terminal	√			√
167	Program Perhubungan Laut		√	√	
	JUMLAH	11	11	11	11
XV	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
168	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
169	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
170	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
171	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
172	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√
173	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	√	√	√	√
174	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	√	√	√	√
175	Program kerjasama informasi dengan mas media	√	√	√	√
176	Program Pengadaan Perangkat Aplikasi dan Telematika	√	√	√	√
177	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	√	√	√	√
178	Program Peningkatan Tata laksana Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√
179	Program Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Postel	√	√	√	√
	JUMLAH	12	12	12	12
XVI	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
180	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
181	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√
182	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
183	Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	x
184	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√
185	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	√	√	√	√
186	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	√	√	√	√
187	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	√	√	√	√
188	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	√	√	√	x
189	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi dan UMKM	√	x	x	x
		10	9	9	7
	Perdagangan				
190	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	√	√	√	√
191	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	√	√	√	√
192	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	√	√	√	x
		3	3	3	2
	Perindustrian				
193	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	√	√	√	√
194	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	√	√	√	√
195	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	√	√	√	√
196	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	√	√	√	x
		4	4	4	3
	JUMLAH	17	16	16	12
XVII	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
197	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
198	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
199	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√

200	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
201	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	√	X	x	√
202	Program Pembuatan Aplikasi Perijinan Online	√	X	x	√
203	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	√	√	√	√
204	Program Rencana Umum Penanaman Modal	√	X	x	√
205	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	√	√	√	√
	JUMLAH	9	6	6	9
XVIII	DINAS STATISTIK DAERAH				
206	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
207	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
208	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
209	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur		√	√	√
210	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	√	√	√	√
211	Program Pengembangan Statistik Daerah	√			√
212	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	√	√	√	√
	JUMLAH	6	6	6	7
XIX	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				
213	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
214	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
215	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
216	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	√	√	√	√
217	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	√	√	√	√
218	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	√	√	√	√
219	Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi Kearsipan	√	√	√	√
220	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan	√	√	√	√
221	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	-	√	√	√
222	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	√	√	√	√
	JUMLAH	9	10	10	10
	Urusan Pilihan				
XX	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
223	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
224	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
225	Program peningkatan disiplin aparat	√	√	√	√
226	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	√
227	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
228	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	√	√	√	√
229	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	√	√	√	x
230	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	√	√	√	x
231	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	√	√	√	√
232	Program pengembangan budidaya perikanan	√	√	√	√
233	Program pengembangan perikanan tangkap	√	√	√	√
234	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	√	√	√	√
235	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	√	√	√	√
	JUMLAH	13	13	13	11
XXI	DINAS PARIWISATA				
	Pariwisata				
236	Program Pemasaran Pariwisata	√	√	√	√
237	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	√	√	√	√
238	Program Pengembangan Kemitraan	√	√	√	
239	Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata				√
240	Program Pengembangan SDM Kepariwisataan				√
241	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata				√
	JUMLAH	3	3	3	5
	Kepemudaan dan Olahraga				
242	Program peningkatan peran serta kepemudaan	√	√	√	√
243	Program pembinaan dan pemasarakan olahraga	√	√	√	√
244	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	√	√	√	√
	JUMLAH	3	3	3	3
XXII	DINAS PERTANIAN				
245	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
246	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
247	Program peningkatan disiplin aparat	√	√	√	√
248	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	√
249	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
250	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	√	√	√	√
251	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	√	√	√	√
252	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	√			√
253	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	√			√
254	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	√	√	√	√
255	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	√			√
256	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	√	√	√	√
257	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	√	√	√	√
	JUMLAH	13	10	10	13
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
XXIII	SEKRETARIAT DAERAH				
258	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
259	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
260	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
261	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
262	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	√	√	√	√
263	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	√	√	√

264	Program Promosi Daerah				√
265	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	√	√	√	√
266	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV AIDS				√
267	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	√	√	√	√
268	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik				√
269	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	√	√	√	√
270	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√	√
271	Program Penataan Daerah Otonom Baru	√	√	√	√
272	Program Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	√	√	√	√
273	Program Administrasi Kerjasama Pembangunan	√	√	√	√
274	Program Peningkatan kapastitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
275	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	√	√	√	√
276	Program Percepatan Reformasi Birokrasi		√	√	√
277	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	√
278	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				√
279	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan				√
280	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				√
281	Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat				√
282	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				√
	JUMLAH	16	17	17	25
XXIV	SEKRETARIAT DPRD				
283	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
284	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
285	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
286	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
287	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	√	√	√	√
288	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	√	√	√	√
	JUMLAH	6	6	6	6
XXV	KECAMATAN RASANA BARAT				
289	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
290	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
291	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
292	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
293	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	-	-	√
294	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	√	-	-	√
295	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	-	-	√
296	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	√	-	-	√
297	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan	√	-	-	-
298	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	√	√	√	√
299	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	√
300	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	√	√	√
301	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√	√	√
	JUMLAH	12	8	8	12
XXVI	KECAMATAN RASANA TIMUR				
302	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
303	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
304	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
305	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
306	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	-	-	√
307	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	√	-	-	√
308	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	-	-	√
309	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	√	-	-	√
310	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan	√	-	-	-
311	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	√	√	√	√
312	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	√
313	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	√	√	√
314	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√	√	√
	JUMLAH	12	8	8	12
XXVII	KECAMATAN ASAKOTA				
315	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
316	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
317	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
318	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
319	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	-	-	√
320	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	√	-	-	√
321	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	-	-	√
322	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	√	-	-	√
323	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan	√	-	-	-
324	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	√	√	√	√
325	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	√
326	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	√	√	√
327	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√	√	√
	JUMLAH	12	8	8	12
XXVIII	KECAMATAN MPUNDA				
328	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
329	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
330	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
331	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
332	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	-	-	√
333	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	√	-	-	√

334	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	-	-	√
335	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	√	-	-	√
336	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan	√	-	-	-
337	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	√	√	√	√
338	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	√
339	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	√	√	√
340	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√	√	√
	JUMLAH	12	8	8	12
XXVIX	KECAMATAN RABA				
341	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
342	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
343	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
344	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
345	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	-	-	√
346	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	√	-	-	√
347	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	-	-	√
348	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	√	-	-	√
349	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan	√	-	-	-
350	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	√	√	√	√
351	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	√
352	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	√	√	√
353	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√	√	√
	JUMLAH	12	8	8	12
XXX	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
354	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
355	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
356	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
357	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√			
358	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√
359	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√	√
360	Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana	√	√	√	√
361	Program Penanggulangan Bencana / Pencegahan Bencana	√	√	√	√
362	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	√	√	√	√
363	Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat	√	√	√	√
364	Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar	√	√	√	√
365	Program Rehabilitasi	√	√	√	√
366	Program Rekonstruksi	√	√	√	√
367	Program kesiapsiagaan	√	√	√	√
368	Program Peringatan Dini	√	√	√	√
	JUMLAH	15	14	14	14
XXXI	INSPEKTORAT				
369	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
370	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
371	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
372	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
373	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	√	√	√	√
374	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	√	√	√	√
375	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	√	√	√	√
376	Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	√	√	√	√
377	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	√	√	√	√
378	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi	√	√	√	-
379	Program mengintensikan penanganan pengaduan masyarakat	√	√	√	√
	JUMLAH	11	11	11	10
XXXII	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
380	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
381	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
382	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
383	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
384	Program Kerjasama Pembangunan	√	√	√	√
385	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	√	√	√	√
386	Program Pengembangan Data/Informasi	√	√	√	√
387	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√	√	√
388	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	√	√	√	√
389	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	√	√	√	√
390	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber daya alam	√	√	√	√
391	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	√			
392	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	√	√	√	√
	JUMLAH	13	12	12	12
XXXIII	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)				
393	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
394	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
395	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
396	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	x
397	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
398	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	√	√	√	√
399	Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	√	√	√	√
400	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	√	√	√	√
	JUMLAH	8	8	8	7
XXXIV	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
401	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
402	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√

403	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
404	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
405	Program Pendidikan Kedinasan	√	√	√	√
406	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√			√
407	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	√	√	√	√
	JUMLAH	7	6	6	7
	JUMLAH TOTAL	380	338	338	372
A	Presentase Program RKPД yang Selaras dengan RPJMD	100%	95%		
B	Presentase Dokumen RKPД dalam KUA/PPAS	100%	100%		
C	Presentase Dokumen KUA/PPAS dalam APBD	100%	95%		

CASCADING SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA LITBANG KOTA BIMA TAHUN 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
MISI RPJMD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TUJUAN OPD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN					
Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Inovasi dalam Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penghargaan Pembangunan Daerah	10 Besar Nasional	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase substansi RPJMD yang selaras dengan RPJPD	95%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan tahunan	100%	Penetapan RPJMD	Tersedianya Dokumen RPJMD 2018-2023	Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023	1 Dokumen	132,470,000.00					
							Persentase Program RKPD yang selaras dengan RPJMD	98%		Meningkatnya Keselarasan Sasaran RENSTRA OPD dengan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah	Persentase Program RKPD yang Selaras dengan RPJMD	100%	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersedianya Rancangan RKPD yang Memenuhi Kaidah Penyusunan	Dokumen Rancangan RKPD	1 Dokumen	104,247,500.00					
							Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD	98%		Meningkatnya keselarasan Program Pembangunan Tahunan dengan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Nilai LKIP Bappeda Litbang	100%	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Berita Acara Hasil Musrenbang	4 dokumen	388,581,600.00					
											Penetapan RKPD	Tersedianya RKPD yang Sesuai Ketentuan	PERKADA tentang RKPD	1 Dokumen	152,250,000.00							
											Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKIP)	Tersedianya LKPJ Walikota	Dokumen LKPJ	1 Dokumen	149,250,000.00							
											Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monev Perencanaan Pembangunan	Laporan Triwulan	4 Laporan	338,300,000.00							
											Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (DBH Cukai Hasil Tambakan)	Terlaksananya Koordinasi dan Monev Kegiatan DBH-CHT	Laporan Koordinasi DBH-CHT Triwulan	4 Laporan	200,000,000.00							
											E - Planning	Tersedianya Aplikasi e-planning	Aplikasi e-planning	1 Aplikasi	83,219,000.00							
											Penyusunan Aplikasi Database Publikasi Penelitian	Tersedianya Aplikasi Database Publikasi Penelitian	Aplikasi Database Publikasi Penelitian	1 Aplikasi	45,270,000.00							
											Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pajak Rokok	Terlaksananya Koordinasi dan Monev Pajak Rokok	Laporan Koordinasi Pajak Rokok Triwulan	4 Laporan	89,400,000.00							
											Meningkatnya kinerja penelitian dan pengembangan	Produk Inovasi Daerah	4	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	10%	Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terselenggaranya Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	Laporan Koordinasi	1 Laporan	95,852,000.00
															Pelayanan Izin Penelitian	Terlaksananya Pelayanan Pendataan Ijin Penelitian	Jumlah Ijin Penelitian yang Diterbitkan	500	58,600,000.00			
															Penguatan Kelembagaan Kelitbangan Kota Bima	Terbentuknya Tim Pengendali Mutu Kota Bima	Tim Pengendali Mutu	SK Tim Pengendali Mutu	111,900,000.00			

MISI RPJMD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TUJUAN OPD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	Meningkatnya pelaksanaan program potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Dokumen Identifikasi dan Sosialisasi TTG	1 Dokumen	Identifikasi dan Sosialisasi Tepat Guna (TTG)	Terlaksananya Identifikasi dan Sosialisasi TTG	Dokumen Identifikasi dan Sosialisasi TTG	1 Dokumen	198,266,000.00
PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG																	
									Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terwujudnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi	Persentase Program RENJA OPD Bidang Ekonomi yang Selaras dengan RKPD	100%	Pengembangan Ekonomi Lokal	Tersedianya Masterplan dan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Lokal	Dokumen Masterplan Pengembangan Ekonomi Lokal	1 Dokumen	79,950,000.00
													Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah	Tersedianya Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen	93,600,000.00
									Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Terwujudnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial Budaya	Persentase Program RENJA OPD Bidang Sosial Budaya yang Selaras dengan RKPD	100%	Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Laporan Pelaksanaan Koordinasi	1 Laporan	362,021,900.00
													Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	Terlaksananya Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	Laporan Pelaksanaan Koordinasi	1 Laporan	67,055,300.00
													Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Pengendalian Kegiatan PKH	Laporan Pengendalian Kegiatan PKH	1 Laporan	87,746,000.00
													Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan Rumpun Kesra	Laporan Koordinasi	1 Laporan	80,000,000.00
													Koordinasi Aksi Pemberantasan Korupsi	Terselenggaranya Koordinasi Aksi Pemberantasan Korupsi	Laporan Koordinasi	1 Laporan	70,010,000.00
													Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program P3K	Terselenggaranya inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program P3K	Laporan	1 Laporan	39,000,000.00

MISI RPJMD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TUJUAN OPD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
													Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas P3A	Terselenggaranya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas P3A	Laporan	1 Laporan	39,000,000.00			
													Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas PP Kesejahteraan Rakyat	Terselenggaranya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas PP Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1 Laporan	39,000,000.00			
													Koordinasi Balai Mediasi	Terselenggaranya Koordinasi Balai Mediasi	Laporan	1 Laporan	69,930,000.00			
													Aksi HAM Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Aksi HAM Daerah	Laporan	1 Laporan	39,000,000.00			
									Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase Program OPD Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang Selaras dengan RKPD	100%	Penyusunan Daya Dukung Lahan dan Air	Tersusunnya Dokumen Daya Dukung Lahan dan Air	Dokumen Daya Dukung Lahan dan Air	1 Dokumen	95,200,000.00			
													Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA, dan Ekonomi	Tersedianya RENJA OPD yang Selaras dengan RKPd dan RENSTRA OPD	RENJA OPD yang Selaras dengan RKPd dan RENSTRA OPD	4 Laporan	293,200,000.00			
													Penyusunan KLHS RTRW	Tersedianya dokumen KLHS RTRW	Dokumen KLHS RTRW	1 Dokumen	211,100,000.00			
									Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Persentase Program/ Kegiatan Rencana Sektor Strategis Dalam RKPd	100%	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Terlaksananya Updeting Rencana PPSP	Dokumen BPS dan MPS	2 Dokumen	116,125,000.00			
													Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	Tersedianya Koordinasi Perencanaan Kota Hijau	Dokumen Perencanaan Kota Hijau	1 Dokumen	103,690,000.00			
									Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam RKPd	100%	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1 Dokumen	114,476,500.00			
													Dokumen Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya	100%	Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya	Terselenggaranya Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya	Laporan Koordinasi	1 Laporan	53,506,250.00	
													Tersedianya Dokumen RTRW	Dokumen RTRW	1 Dokumen	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima	Tersedianya Dokumen RTRW	Dokumen RTRW	1 Dokumen	296,710,000.00

Bima, 4 Februari 2019
Kepala Bappeda Litbang Kota Bima,



Ir. DARWIS

Pembina Utana Muda (IV/c)
NIP. 19601231 199103 1 087